

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DORIS ALEXANDER RIHI
NIK : 5371022912700001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PEMERINTAHAN
Jabatan : KEPALA BIRO
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 12 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : STEFANUS SURAT
NIK : 5371031006720003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PEMERINTAHAN
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 9 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : LAURENSIUS TAEK SERAN
NIK : 5371023108670003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PEMERINTAHAN
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 25 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-03-25 18:57:14



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : JOLANDA LISDAWATI NDOLU
NIK : 5314036403911001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PEMERINTAHAN
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 7 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-03-07 08:05:17



IKHTISAR LHKPNa.n YUVENARIS BATO BERIBE
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2023)
NIK5371021303680002

1. DATA PRIBADI

Nama	: YUVENARIS BATO BERIBE
NIK	: 5371021303680002
No KK	: 53710424001130010
NPWP	: 487254633922000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: PENFUI/13 Maret 1968
Status Nikah	: Menikah
Agama	: KATOLIK
Alamat	: JLN. FATUTUAN, OEBOBO, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor Handphone	: 081288275133
Email	: juvenusberibe@gmail.com
NHK	: 745465
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH KOTA KUPANG
Jabatan	: KEPALA BIDANG - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Tanggal Lapor	: 31 Desember 2023
Tanggal Kirim	: 4 Maret 2024
Status	: Proses Verifikasi



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	EMERENSIANA KEMBA WULA	ISTRI	BAJAWA , 5 Maret 1973 / Perempuan	PNS	JL.FATUTUAN
2	HERAKLIUS P. BASTITA BERIBE	ANAK TANGGUNGAN	KUPANG , 17 April 2003 / Laki-Laki	PELAJAR	JL.FATUTUTAN
3	MARIA GEMMA GALBANI O. BERIBE	ANAK TANGGUNGAN	KUPANG , 4 Mei 2008 / Perempuan	TIDAK BEKERJA	JLN. FATUTUAN, Kelurahan LILIBA, Kecamatan OBOBO, KOTA KUPANG , Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA BIDANG	PEMERINTAH KOTA KUPANG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : - Kel. / Desa : NAIMATA Kecamatan : MAULafa Kab. / Kota : KOTA KUPANG Prov. / Negara : NUSA TENGGARA TIMUR / INDONESIA	Tanah: 4.650 m ² Bangunan: - m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 383 Atas Nama: LAINNYA (SUSANA TAKLAL OEMATAN) Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: LAINNYA	Rp. 357.500.000	Rp. 393.250.000	UBAH



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
			Tahun Perolehan: 2001			
2	Jalan / No : - Kel. / Desa : MANUSAK Kecamatan : KUPANG TIMUR Kab. / Kota : KUPANG Prov. / Negara : NUSA TENGGARA TIMUR / INDONESIA	Tanah: 1.750 m ² Bangunan: - m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 472 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2010	Rp. 137.500.000	Rp. 151.250.000	UBAH
Sub Total					Rp. 544.500.000	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : SEPEDA MOTOR Tahun Pembuatan : 2021 No. Pol. / Registrasi : DH 6751 KS	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN, PASANGAN/ANAK (EMERENSIANA KEMBA WULA) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2021	Rp. 20.000.000	Rp. 18.000.000	UBAH
2	Jenis : MOTOR Merk : YAMAHA Model : SEPEDA MOTOR Tahun Pembuatan : 2012 No. Pol. / Registrasi : DH 2847 HF	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (EMERENSIANA KEMBA WULA) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI	Rp. 10.000.000	Rp. 9.000.000	UBAH



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Lainnya: - Tahun Perolehan: 2012			
3	Jenis : MOBIL Merk : TOYOTA Model : MINI BUS Tahun Pembuatan : 2015 No. Pol. / Registrasi : DH 1321 BE	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2015	Rp. 115.000.000	Rp. 113.000.000	UBAH
Sub Total				Rp. 140.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
----	--------	--------------------	-----------------	-----------------------------	------------

[illegible]

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
	Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN				
Sub Total				Rp. 350.000.000	Rp. 110.000.000

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 71.023.200	Rp. 58.500.000
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 35.425.296	Rp. 11.660.064
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 106.448.496	Rp. 70.160.064

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
----	------------------	----------------------



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0



6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 60.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 5.000.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 3.500.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 68.500.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0



6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 748.340.408	Rp. 110.000.000	Rp. 638.340.408

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : **ONDY CHRISTIAN SIAGIAN**

NIK : **5371041912650004**

Lembaga : **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Unit Kerja : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Sub Unit Kerja : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

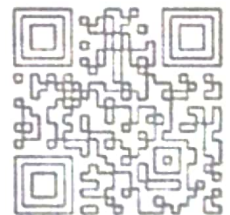
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Jenis Laporan : **Periodik - 2023**

Tanggal Kirim : **26 Februari 2024**

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MARGERITHA LIBRAYANTI ADRIANA DJARI

NIK : 5371044410670004

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 8 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ANINDYA WIDARYATI
NIK : 5371036704740008
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Kerja : BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 25 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-03-25 19:55:09

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : PETRUS BEREK KLAU
NIK : 5371043110660005
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Kerja : BIDANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 27 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : OCTAVINA LIBERTY KALLIBATU
NIK : 5312156010790001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 5 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-02-05 13:28:16



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KARTIKA KARA THEEDENS
NIK : 5371046208840001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim : 14 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-03-14 13:09:04

Yth. Sdr SEVERINUS LUSIANUS MEMOKODO

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SEVERINUS LUSIANUS MEMOKODO
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



**PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav.
4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : JEMI ERIANTO MELLA

Jabatan : KEPALA BIDANG -
BIDANG MINERAL DAN
BATUBARA - DINAS
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA
TIMUR

**Tanggal /
Tahun** : 2023



12





Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : STEVEN THOBYAS LAY
NIK : 5371020709660003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Kerja : BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 7 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: DOMINIKUS TAEK
Jabatan	: KEPALA - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG, ROTE NDAO DAN SABU RAIJUA DI KUPANG - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan



20





Yth. Bapak/Ibu Ferdinandus Gunawan Hasan

Terima kasih atas upaya Bapak/Ibu untuk taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan berkontribusi dalam penerimaan negara.

Notifikasi ini merupakan bentuk apresiasi DJP kepada Bapak/Ibu atas partisipasi pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 secara lebih awal, yakni pada periode 1 Januari - 29 Februari 2024.

Kami harap Bapak/Ibu dapat terus menyampaikan Laporan SPT lebih awal untuk Tahun Pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak





**KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav.
4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: AGUSTINUS RANDE : SIGASARE
Jabatan	: KEPALA - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : WILAYAH KABUPATEN ALOR DI KALABAHI - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanqqal /	



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ROSARIUS FLAVIANUS

NIK : 5319012702800001

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KABUPATEN NGADA, KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI RUTENG

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI
BARU TERBARUKAN

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 27 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Bukti Pengiriman LHKPN
27-March-2024.docx

Tags +



1

Yth. Sdr ARY MOTO DUNGA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950
LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: ARY MOTO DUNGA
Jabatan	: KEPALA SEKSI MINERAL BATUBARA, GEOLOGI DAN AIR TANAH - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 27 Maret 2024

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



Save as PDF



Export



More





Yth. Bapak/Ibu Damianus Lodan

Terima kasih atas upaya Bapak/Ibu untuk taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan berkontribusi dalam penerimaan negara.

Notifikasi ini merupakan bentuk apresiasi DJP kepada Bapak/Ibu atas partisipasi pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 secara lebih awal, yakni pada periode 1 Januari - 29 Februari 2024.

Kami harap Bapak/Ibu dapat terus menyampaikan Laporan SPT lebih awal untuk Tahun Pajak berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak



Erase Protect Help



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : YOSEPH EMANUEL UDE BEME
NIK : 5319011812750006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KABUPATEN NGADA, KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI RUTENG
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 27 Maret 2024

Catatan

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN





Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ROSARIUS FLAVIANUS

NIK : 5319012702800001

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KABUPATEN NGADA, KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI RUTENG

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI
BARU TERBARUKAN

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 27 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 message

Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id>
To: yosefatulolon@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : YOSEF KASMIRUS KUA ATULOLON

NPWP : 876507104921000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/02/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 421042063162478229512

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sesuai tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau tindakan lainnya yang melanggar hukum adalah dilarang.



Yth. Sdr NOVIAN TO

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : NOVIAN TO

KEPALA SEKSI
KETENAGALISTRIKAN DAN
ENERGI BARU TERBARUKAN -
CABANG DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Jabatan : WILAYAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA, KABUPATEN
BELU, KABUPATEN MALAKA DAN
KABUPATEN MALAKA



Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama	: ROBERTUS IRWANTO
Jabatan	: KEPALA - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2023



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DAUD YUSUP TANGHAMAP
NIK : 5305033101860001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KABUPATEN ALOR DI KALABAHI
Jabatan : KEPALA SEKSI MINERAL BATUBARA, GEOLOGI DAN
AIR TANAH
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 21 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YAKOBUS OLA KOPON

NIK : 5313051401790002

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES
TIMUR, KABUPATEN SIKKA, KABUTAPEN ENDE DAN
KABUPATEN NAGEKEO DI MAUMERE

Jabatan : KEPALA SEKSI MINERAL BATUBARA, GEOLOGI DAN
AIR TANAH

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 21 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ELVIA EVI PADA

NIK : 5371036405820005

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Kerja : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG, ROTE
NDAO DAN SABU RAIJUA DI KUPANG

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI
BARU TERBARUKAN

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 2 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Penulis telah mengunci bagian doku...



IKHTISAR LHKPN a.n YUSTINA DONGI
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2023)
NIK 5371046208730001

1. DATA PRIBADI

Nama : YUSTINA DONGI
 NIK : 5371046208730001
 No KK : 5371042112072019
 NPWP : 144883634922001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : ZEPE/22 Agustus 1973
 Status Nikah : Menikah
 Agama : KATOLIK
 Alamat : JL. RANTAI DAMAI RT.028 RW.008, OEOBO, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
 Nomor Handphone : 08113815331
 Email : yustindongi@gmail.com
 NHH : 863640
 Bidang : EKSEKUTIF
 Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Tanggal Laporan : 31 Desember 2023
 Tanggal Kirim : 6 Maret 2024
 Status : Proses Verifikasi

2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	
1	ABSALOM KAKU	SUAMI	ALOR , 20 Februari 1968 / Laki-Laki	KARYAWAN HORORER	JL. RANTAI DAUN MUDA KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
2	GABRIELA DOMINIKA KAKU WALLY	ANAK TANGGUNGAN	KUPANG , 9 Juni 2000 / Perempuan	WIRASWASTA	JL. RANTAI DAUN MUDA KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
3	MARIA YOSEFINA SADA	ANAK TANGGUNGAN	KUPANG , 14 Agustus 2002 / Perempuan	MAHASISWA	JL. RANTAI DAUN MUDA KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERONIKA NAATONIS
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 486862

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 372.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KOTA KUPANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 251.650.000
2. Tanah Seluas 465 m2 di KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp.
121.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.300.000

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA/MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA NF100 D/SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 3.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 540.865.862

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.090.915.862

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.090.915.862

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YOHANES OKTOVIANUS
NIK : 5318012910660002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jabatan : KEPALA BADAN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 15 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MERRY THERESIA SIUS
NIK : 5371026903710006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG
/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN APBD PROVINSI
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim : 8 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MARIA VERONIKA DHONE MAGHI
NIK : 5309064606840005
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 20 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



IKHTISAR LHKPN a.n FREDERIK C. P. KOENUNU
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2023)
NIK 5371041511710006

1. DATA PRIBADI

Nama	:	FREDERIK C. P. KOENUNU
NIK	:	5371041511710006
No KK	:	-
NPWP	:	479012957922000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	WONOSOBO/15 November 1971
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	KRISTEN
Alamat	:	Jalan Seruni RT 001/RW 001 Kelurahan Naikoten satu Kecamatan Kota Raja, KOTA RAJA, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor Handphone	:	082219174112
Email	:	fredychristian7@gmail.com
NHK	:	486653
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jabatan	:	KEPALA DINAS - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tanggal Lapor	:	31 Desember 2023
Tanggal Kirim	:	27 Maret 2024
Status	:	Proses Verifikasi



Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

Atas Nama	: SIPRIANUS KOPONG KELEN
NIK	: _____
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja	: SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja	: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jabatan	: KEPALA BIRO
Jenis Laporan	: Periodik - 2022
Tanggal Kirim	: 9 Februari 2023



 Dipindai dengan CamScanner

Yth. Sdr **FREDERIK KIUK**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: FREDERIK KIUK
Jabatan	: PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MERRY THERESIA SIUS

NIK : _____

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG
/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN APBD PROVINSI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 9 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **MERRY THERESIA SIUS**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: MERRY THERESIA SIUS
Jabatan	: KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN EVALUASI DAN PELAPORAN APBD PROVINSI - BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DEMY KU

NIK :

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 20 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

message

aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Dikirim oleh: yanes.panie@gmail.com

13 February 2023 at 10:24

Yth. Sdr YANES GUSMAN PANIE

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YANES GUSMAN PANIE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG /
JASA - BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : LUCIUS WIDODO LULY
NIK : _____
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI
PENGADAAN BARANG/JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 13 Maret 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Asan

ikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
ada: olgapawe@gmail.com

26 Februari 2023 pukul 12.35

th. Sdr DOMINIKA ODELBERTA GAUDENZIA PAWE

EMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

di Tempat

bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DOMINIKA ODELBERTA GAUDENZIA PAWE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - BAGIAN PENGELOLAAN
Bidang : PENGADAAN BARANG / JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Lembaga : EKSEKUTIF
Tanggal / Tahun : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Pelaporan : 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

://mail.google.com/mail/u/0/?ik=71658faf80&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1758866706112042816&simpl=msg-f%3A175886670611... 1/2



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MARDIOSY EKHDONAL RIHI RATU

NIK : 505

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG / JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 9 Maret 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Sdr SOFI J. MESSAKH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tempat

Sama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama : SOFI J. MESSAKH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG / JASA - BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DAERAH
Jabatan : EKSEKUTIF
Instansi : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tahun / Tahun : 2022
Laporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Lampiran rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ARABINAYA LEOMIN LUMBU LAMBA

NIK : -

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : PATRISIA YULISTIARINI DJAMI

NIK :

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 14 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : LEONARDO AGUSTO ZAZA RAMADHAN LANGODAY

NIK : 5

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 24 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : OCTOVIANUS GOLLU TENA
NIK : _____
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 23 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KOLLO THALIB
NIK :
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 20 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
To: rivan.foyh@gmail.com

Mon, Feb 20, 2023 at 12:30

Yth. Sdr RIVANTUS FOYH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RIVANTUS FOYH
Jabatan : KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA -
SEKRETARIAT DAERAH
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
**Tanggal / Tahun
Pelaporan** : 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUSANA I. H. LUKAS

NIK : -

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ARIES SUDHARMONO
NIK :
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jabatan : KELOMPOK KERJA LPSE
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 10 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : **ANWAR HARIJANA**

NIK : **5**

Lembaga : **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Unit Kerja : **SEKRETARIAT DAERAH**

Sub Unit Kerja : **BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH
DAN PEJABAT POLITIK**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Jenis Laporan : **Periodik - 2022**

Tanggal Kirim : **30 Januari 2023**

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Kotak Masuk



Aplikasi e-LHKPN 08.45
kepada saya

Yth. Sdr JANS EPAFRODITUS ZACHARIAS SIBU
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: JANS EPAFRODITUS ZACHARIAS SIBU KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
Jabatan	: BARANG/JASA - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Yth. Sdr **SAMUEL ARIE PARERA**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: SAMUEL ARIE PARERA
Jabatan	: KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : YUSTIN ELVRY TOKA

NIK :

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA

Jabatan : BARANG/JASA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 14 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MAGLON TEUF

NIK :

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jabatan : BENDAHARA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 10 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: INDRI MAYASARI SUSETYO
Jabatan	: KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

Yth. Sdr **BOBY LODOVIC DA COSTA**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: BOBY LODOVIC DA COSTA
Jabatan	: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - BIRO UMUM - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

Yth. Sdr **HANOK MELKIANUS MANESI**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: HANOK MELKIANUS MANESI
Jabatan	: KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RIKY DEDISON RIHI PAKE
NIK : - 00000
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jabatan : KELOMPOK KERJA LPSE
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 3 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Yth. Sdr **PETRUS LEMBA**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: PETRUS LEMBA
Jabatan	: KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

Yth. Sdr **FRANS BUDIMAN JOHANNES**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: FRANS BUDIMAN JOHANNES
Jabatan	: KELOMPOK KERJA LPSE - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 01 Januari 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SAUL DAVI MUDAK
NIK :
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Kerja : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PENGOLAHAN
DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 10 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KORNELIS KOPONG BOLEN

NIK :

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Kerja : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jabatan : KELOMPOK KERJA LPSE

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 7 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpnp@kpk.go.id | <https://elhkpnp.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PETRUS SERAN TAHUK
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 764703

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah Seluas 1354 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, INNOVA V Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AEV415WCX(4X2) M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.859.699

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.137.859.699

III. HUTANG Rp. 296.000.000

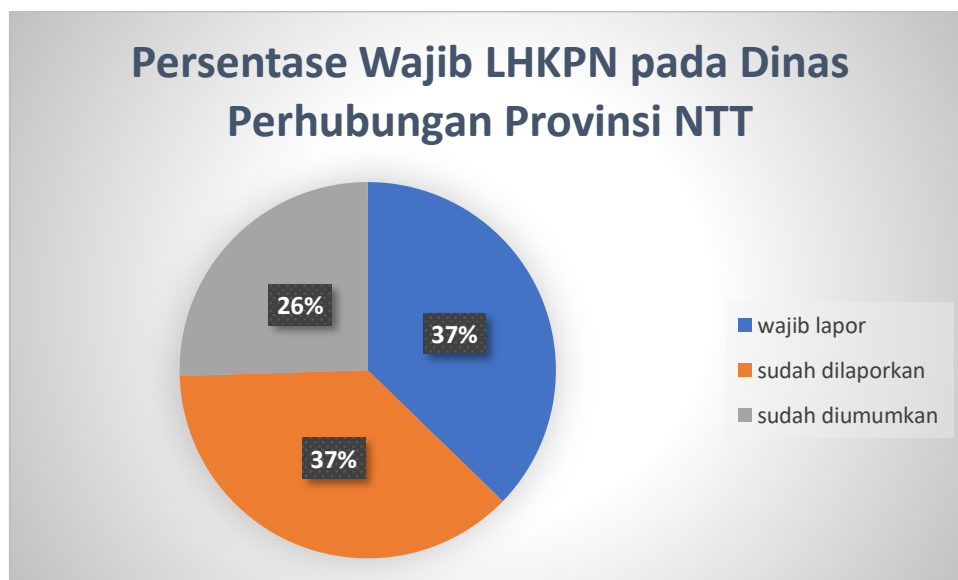
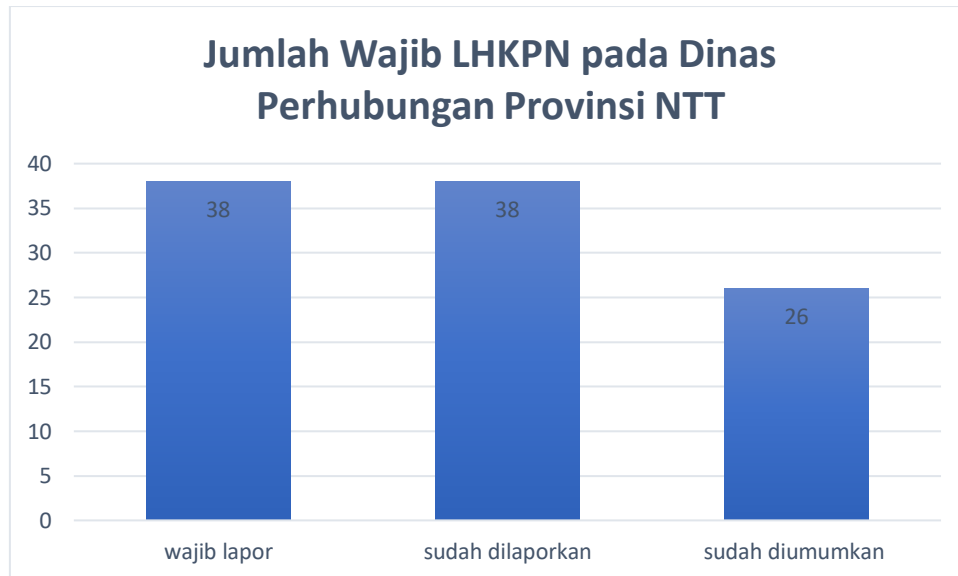
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 841.859.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANES TAKA DOSI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 655118

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 888.420.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/381 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah Seluas 1456 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 101.920.000
3. Tanah Seluas 6230 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 311.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 361.896.500

1. MOBIL, NISSAN CEDRIC 3.2 DIESEL MT/TAKSI Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000
2. MOBIL, SUZUKI AIJ31OF GY (4Y.2) M/T / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 93.400.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 219.996.500
4. MOTOR, VIAR V 15 T M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 36.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.345.916.500

III. HUTANG Rp. 8.412.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.337.504.500



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTINUS HERMINIGILDUS DHEWA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 908024

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1397 m2/128 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 875 m2/250 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 23000 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 2590 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.300.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	745.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	745.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADRIANI LOMI GA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
3. NHK : 839060

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.108.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	31.858.000
III. HUTANG	Rp.	195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-163.142.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI
3. NHK : 653042

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	401.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/115.77 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 326.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	739.811.929
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.140.811.929
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.140.811.929

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARNOLDUS PRIMAYUS WOGA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
3. NHK : **861393**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 553.553.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/63 m2 di KAB / KOTA SIKKA, WARISAN Rp. 353.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/81 m2 di KAB / KOTA SIKKA, WARISAN Rp. 200.313.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, SUZUKI CARRY ST 130 FUTURA Tahun 1991, WARISAN Rp. 23.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 SLD Tahun 2007, WARISAN Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 145.953.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.283.705

F. HARTA LAINNYA Rp. 8.000.000

Sub Total Rp. 823.589.705

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 823.589.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARYOS P Y LARO BAY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
3. NHK : 849529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA/SUV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 254.500.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 184.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTOFEL TAGA PONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHHK : 863566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8010 m2/8010 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJABG SUPERKF 83/MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.074.390

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 451.074.390

III. HUTANG Rp. 102.074.390

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 349.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMINIKUS BILI JOGAR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
3. NHK : 775219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 865.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/26 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/25 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.850.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA IMPRESA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.043.850.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.043.850.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRANSISKA ROSALINDA DABIDJA KONDI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 843127

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	72.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2005, HASIL SENDIRI		
Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	104.106.045
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.727.904
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	194.833.949
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	194.833.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : THRESE ELDA NDOLU EOH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 849570

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 70.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HADIAH Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 285.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 285.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FLORIANUS NIGA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
3. NHK : **933815**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 688 m2/80 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SATRIA YOUNG STAR 115 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.021.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 126.021.000

III. HUTANG Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -173.979.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARMINTO CONELLY ROHY**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN**
3. NHK : **842495**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 835.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 1904 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 3001 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 3670 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 238.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2013, WARISAN Rp. 115.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOTOR, KYMCO BALERO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.174.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.174.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JANUARIUS GUSTAF LEBA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN
3. NHK : 249787

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	40.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG TOYOTA Tahun 2001, HASIL SENDIRI		
Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	47.850.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	47.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSEPH V. P. NUSA DOREN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 838648

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	108.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	116.500.000
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	66.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSWALDE ELISABETH FREDISU WINDA BERELOY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 910309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	14.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.800
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.002.800
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.002.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAKSI EDUARD EDISON KASEH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 842742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/396 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, SUPRA X 125 HONDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, REVO HONDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 616.015.000

III. HUTANG Rp. 58.212.736

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 557.802.264

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Maria Wilfrida Basilika
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 681435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/105 m2 di KAB / KOTA
SIKKA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOBIL, KIJANG PICK UP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 534.450.000

III. HUTANG Rp. 320.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 214.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTINUS HENDRIKUS DA GOMEZ**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN**
3. NHK : **838480**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 36.670.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 26.670.000
2. Tanah Seluas 506 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.200.000

1. MOTOR, HONDA VARIO ESP 125 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.900.000
2. MOTOR, HONDA NEW VARIO 125 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.400.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G / MICRO/MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 94.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.497.200

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 171.467.200

III. HUTANG Rp. 347.721.171

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -176.253.971

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEFFIBOSET E. I. B. EOH

2. Jabatan : KEPALA UNIT

3. NHK : 878515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA

KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 401.000.000

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 201.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NGGALA HAMBA NDIMA**
2. Jabatan : **KEPALA UNIT**
3. NHK : **857569**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/144 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, KIJANG MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.691.200

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 546.941.200

III. HUTANG Rp. 104.338.937

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 442.602.263

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PIUS SAJU
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 918961

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 490.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 490.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONALDO ENGELBERT
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN
3. NHH : 852684

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LUX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 588.500.000

III. HUTANG Rp. 263.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 325.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEMUEL PATIUNG
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 849012

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 452.115.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 478 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 48.854.000
2. Tanah Seluas 2.623 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.821.000
3. Tanah Seluas 2.5 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 282.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.100.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
2. MOTOR, HONDA CS12AIRR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA DIP02N13L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.613.852

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 756.328.852

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 756.328.852



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SERLINDA LURUK BERE NIGI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 842739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO MPX 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO MPX 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI		
Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	55.000.000
III. HUTANG	Rp.	164.422.987
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-109.422.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : URSULA BESNA NORHENY SENARU
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 838992

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 32.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/108 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.112.384

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 110.112.384

III. HUTANG Rp. 1.320.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 108.792.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS DEMU
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 838700

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 337.911.000

1. Tanah Seluas 317 m2 di KAB / KOTA SIKKA, HASIL SENDIRI Rp. 222.534.000
2. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA MAUMERE, WARISAN Rp. 88.350.000
3. Bangunan Seluas 63 m2 di KAB / KOTA KOTA MAUMERE, HASIL SENDIRI Rp. 27.027.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 39.700.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.900.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 18.600.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.140.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 477.801.000

III. HUTANG Rp. 477.940.592

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -139.592

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : JONI LIE ROHI LODO
NIK : 5371011707670005
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 1 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ALFONSIUS ARA KIAN
NIK : 5371040208740009
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 23 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : WILHELM ANSGAR HERMANUS
NIK : 5371030806750002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : BIDANG DESTINASI PARIWISATA
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 30 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : BENI AGUSTIN DA COSTA
NIK : 5371047008800003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 21 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-08-06 17:22:19



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : CHARLIE BEATRIX ROHI BUNGA
NIK : 5371015906810001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 20 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MERSIANUS NUBATONIS
NIK : 5371040205860011
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sub Unit Kerja : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 10 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : CORNELIS WADU
NIK : 5371041405650004
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Unit Kerja : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Kerja : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jabatan : KEPALA SATUAN
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 31 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **ERIKH BENYDIKTA MELLA**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: ERIKH BENYDIKTA MELLA
Jabatan	: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - BIRO UMUM - SEKRETARIAT DAERAH
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**